



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep. 531 - BKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 954/KEP.32-
BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta perihal usulan perubahan pejabat KPA dan BPP pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.32-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memperhatikan surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Nomor : 954/742/Perenc/2019, tanggal 04 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep. 499-BKAD/2019 tentang Pengesahan DPPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

2. Surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Nomor 954/742/Perenc/2019, tanggal 04 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.32-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep. 531 - BKAD/2019
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 954/KEP.32-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN
I	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2. Bintek SPIP; 3. Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Pertanian; 4. Sosialisasi Asuransi Usaha Tani; 5. Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian; 6. Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Brigade Alsintan);
II.	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pola Pangan Harapan; 2. Kawasan Rumah Pangan Lestari; 3. Pemantauan Harga Pangan; 4. Pengadaan Gabah Untuk Lumbung Pangan Masyarakat (Pendukung DAK 2019); 5. Lomba Cipta Menu Pangan; 6. Hari Pangan Sedunia; 7. Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi; 8. Piloting Penanganan Rawan Pangan; 9. Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat; 10. Pengawasan Keamanan Pangan; 11. Pengelolaan dan Pembinaan Cadangan Pangan; 12. Dewan Ketahanan Pangan; 13. DAK Reguler Bidang Pertanian Sektor Ketahanan Pangan (DAK 2019); 14. Pengadaan Beras; 15. Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan/P2WKSS;
III	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pertanian Organik; 2. Pengembangan Palawija; 3. Pengembangan Teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan; 4. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Padi; 5. Pelaporan Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung, Kedelai dan Cabai; 6. Perlindungan Tanaman Pangan dan Penanggulangan DPI dan Emergency Bencana Alam;

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN
		7. Penangkaran Benih Tanaman Pangan; 8. Pembelian Bibit Untuk Kelompok Tani Kecamatan Cibatu; 9. Pembelian Pupuk Untuk Para Petani Padi se-Wilayah Kecamatan Campaka dan Cibatu;
IV.	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	1. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pelaku Usaha Perkebunan Teh; 2. Pembinaan Petani di sekitar Perkebunan Besar Swasta; 3. Pengembangan Perkebunan Teh Organik; 4. Rehabilitasi Tanaman Teh; 5. Peningkatan Produksi Hortikultura; 6. Pemeliharaan Tanaman Manggis di Tanah Asset Pemda; 7. Pengembangan Tanaman Manggis dan Durian;
V.	KEPALA BIDANG SUMBERDAYA PERTAMANAN	1. Dialog Umum Peningkatan Mutu Pertanian; 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani; 3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida; 4. DAK Reguler Bidang Pertanian (DAK 2019); 5. Penyusunan Program Penyuluhan; 6. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Penyuluh; 7. Peningkatan Kinerja THL Penyuluh Pertanian; 8. Penyusunan RDKK; 9. Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan; 10. Hari Krida Pertanian;

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep. 531 - BKAD/2019
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 954/KEP.32-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN
I	SEKRETARIS	
a.	YAYAN YULIANTO,BSc Nip. 19650707 200604 1 003	1. Pengelolaan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2. Bintek SPIP; 3. Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Pertanian; 4. Sosialisasi Asuransi Usaha Tani; 5. Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian; 6. Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Brigade Alsintan);
b.	MIA NURBADRIAH, A.Md Nip.19820320 200701 2 006	1. Perlindungan Tanaman Pangan dan Penanggulangan DPI dan Emergency Bencana Alam; 2. Penangkaran Benih Tanaman Pangan;
II.	BIDANG KETAHANAN PANGAN	
a.	KIKI HARDIANSYAH, SE Nip. 19820810 200701 1 003	1. Penyusunan Pola Pangan Harapan; 2. Kawasan Rumah Pangan Lestari; 3. Pemantauan Harga Pangan; 4. Lomba Cipta Menu Pangan; Hari Pangan Sedunia; 5. Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi; 6. Pengawasan Keamanan Pangan; 7. Peningkatan Produktivitas Lahan 8. Pekarangan/P2WKSS;
b.	ESA TRIGUNA, A.Md Nip.19830107 201001 1 004	1. DAK Reguler Bidang Pertanian Sektor Ketahanan Pangan (DAK 2019); 2. Piloting Penanganan Rawan Pangan; 3. Pengelolaan dan Pembinaan Cadangan Pangan; 4. Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat; 5. Dewan Ketahanan Pangan; 6. Pengadaan Gabah Untuk Lumbung Pangan Masyarakat (Pendukung DAK 2019); 7. Pengadaan Beras;

II.	BIDANG KETAHANAN PANGAN	
c.	KIKI RIZKYBAYU Nip. 19830907 201001 1 001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Kerwanan Pangan dan Gizi; 2. Pemantauan Harga Pangan;
III.	BIDANG TANAMAN PANGAN	
a.	HERU AMARUDIN, SP Nip.19710306 201412 1 002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pertanian Organik; 2. Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Padi; 3. Pelaporan Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung, Kedelai dan Cabai;
b.	ASEP DADAN Nip. 19821211 201412 1 002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Palawija; 2. Pengembangan Teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan;
c.	DIDI RUSDIANA Nip. 19810309 201412 1 002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Bibit Untuk Kelompok Tani Kecamatan Cibatu; 2. Pembelian Pupuk Untuk Para Petani Padi se-Wilayah Kecamatan Campaka dan Cibatu;
d.	MIA NURBADRIAH, A.Md Nip. 19820320 200701 2 006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Tanaman Pangan dan Penanggulangan DPI dan Emergency Bencana Alam; 2. Penangkaran Benih Tanaman Pangan;
IV.	BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
a.	DUI SAPRINA br GINTING Nip. 19750421 201412 1 001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pelaku Usaha Perkebunan Teh; 2. Pembinaan Petani di sekitar Perkebunan Besar Swasta; 3. Pengembangan Perkebunan Teh Organik; 4. Rehabilitasi Tanaman The; 5. Peningkatan Produksi Hortikultura; 6. Pemeliharaan Tanaman Manggis di Tanah Asset Pemda; 7. Pengembangan Tanaman Manggis dan Durian;
V.	BIDANG SUMBERDAYA PERTAMANAN	
a.	CHEVI MULYAWAN, SE Nip. 19750421 201412 1 001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani; 2. Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida; 3. DAK Reguler Bidang Pertanian (DAK 2019); 4. Penyusunan RDKK;

b.	ADE TIRTA KAMDANU Nip.19840125 201412 1 001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog Umum Peningkatan Mutu Pertanian; 2. Peningkatan Kinerja THL Penyuluh Pertanian; 3. Hari Krida Pertanian;
c.	DAHLAN HERMAWAN Nip.19710717 200701 1 008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Programa Penyuluhan; 2. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Penyuluh; 3. Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan;

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA